

Ridwan Kamil Sebut Minggu Depan Ada Breaking News, Apa Maksudnya?

JAKARTA (IM) - Ridwan Kamil punya beberapa opsi dalam langkah politiknya ke depan usai purnatugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil menyebut bakal ada breaking news pekan depan. Apa maksudnya?

"Kami mohon doa, takdir kami belum tahu kemana kami tidak tahu, tapi insyaallah Allah memberikan yang terbaik, tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi," ucap Ridwan Kamil dalam sertiab dengan Pj Gubernur Jabar di Gedung Sate, Bandung kepada wartawan, Rabu (6/9).

Ridwan Kamil belakangan santer dikabarkan akan dipinang untuk menjadi cawapres. Ridwan Kamil hanya melepaskan kode soal breaking news itu.

"Kodenya itu aja," kata Ridwan Kamil dia sembari melepas tawa.

Kang Emil—sapaan akrab Ridwan Kamil—juga melempar pantun yang menurutnya terbaik yang pernah dia tulis. Pantun itu dibacakan di hadapan tamu undangan sertiab dan juga Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin.

"Dari Karawang pergi ke

Tasik, dari Subang pergi ke Cipatik. Kami datang dengan baik-baik dengan niat baik, sekarang kami pulang baik-baik dengan hasil baik," ucap dia disambut tepuk tangan.

Mantan Wagub Jabar Uu Ruzhanul sebelumnya ikut bicara soal isu Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Uu menyambut baik jika Ridwan Kamil bergabung dengan Ganjar. "Kalau sampai bergabung dengan Pak Ganjar, syukur alhamdulillah. Berarti kader Jawa Barat ada peluang untuk itu," ucapnya.

Uu pun bercerita soal dirinya meminta tolong kepada Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata Uu, diketahui oleh Ridwan Kamil.

"Yang kedua kan juga yang mungkin pertama saya menyampaikan kepada Ganjar, tolong kalau bisa bergabung dengan Pak

KK, sebelum Pak Ganjar dicalonkan oleh PDIP dan lainnya, saya yang...tapi atas restu beliau. 'Pak saya mau silaturahmi ke Pak Ganjar,'" ujar politikus PPP ini. ● mar

Akun Youtube DPR Diretas, Sekjen akan Ambil Langkah Hukum

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar memastikan, Kesetiaan DPR akan mengambil langkah hukum terkait peretasan atau hack terhadap akun channel resmi Youtube DPR RI. Akun tersebut menampilkan tayangan judi slot.

Menurut Indra, langkah tersebut memang akan dilakukan. Namun, saat ini DPR bersama Bareskrim Polri dan BSSN masih terus melakukan pemulihan atau recovery sistemnya terlebih dahulu.

"Setelah itu tentu kami akan tracing penyebabnya dan ambil tindakan hukum," kata Indra saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/9).

Di sisi lain, kata dia, langkah yang sudah diambil sejak pagi tadi adalah menghubungi pihak Google Indonesia untuk melakukan pemulihan atau recovery akun Youtube DPR. Dari pihak Google, tutur Indra, sudah meneruskan kepada pihak Google pusat untuk pemulihan akun agar login akun tersebut dapat digunakan lagi oleh DPR.

"Sementara ini, dari pihak IT internal setjen juga

melakukan recovery manual melalui online dari sistem Google secara mandiri," katanya.

Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri pun telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan.

"Team CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Direktorat Tindak Pidana Siber, sudah turun untuk melakukan Penyelidikan terkait kejadian tersebut," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Brigien Adi VIVID Agustidi Bachtiar kepada wartawan, Rabu (6/9).

Pantauan hingga pukul 09.32 WIB, nampak akun YouTube tersebut terdapat 5 video streaming tutorial bermain judi slot. Siaran langsung judi slot masih berlangsung.

Nampak pula, sebanyak 510 orang menonton siaran langsung terdengar dengan ribuan komentar. Belum diketahui siapa yang meretas akun tersebut. Dalam siaran langsung terdengar narrator menggunakan bahasa asing. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



MUHAIMIN ISKANDAR TIBA DI NASDEM TOWER

Ketua Umum PKB yang juga bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali (kanan) saat tiba di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (6/9).

Kerap Mangkir Saat Dipanggil, KPK Ultimatum Presdir PT RDG Airlines

Gibrael Isaak sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK. Padahal keterangannya sangat dibutuhkan untuk penyidikan TPPU Lukas Enembe.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Presiden Direktur (Presdir) PT RDG Airlines, Gibrael Isaak, lantaran kerap mangkir dari panggilan penyidik KPK. Gibrael Isaak sebetulnya diperiksa sebagai saksi.

"Gibrael Isaak (Presdir PT RDG), saksi tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi apapun terkait alasan ketidakhadirannya," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Rabu (6/9).

"KPK ingatkan ke-

wajiban hukum tersebut dan agar saksi dimaksud kooperatif hadir untuk penidwalan pemanggilan berikutnya," ujarnya.

Gibrael Isaak sedikitnya sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. KPK akan menjalankan ulang pemeriksaan terhadap Gibrael karena keterangannya sangat dibutuhkan untuk penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe.

KPK sebelumnya telah mencegah Gibrael Isaak un-

tuk bepergian ke luar selama enam bulan ke depan berkaitan dengan kasus TPPU Lukas Enembe (LE). Gibrael Isaak dicegah ke luar negeri bersama dua orang lainnya yakni, Dommy Yamamoto dan Jimmy Yamamoto.

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka. Kali ini, Lukas ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Lukas ditetapkan sebagai tersangka TPPU setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapat dari hasil pengembangan penyidikan kasus penerimaan suap dan gratifikasi terkait berbagai proyek di Papua.

KPK telah lebih dulu menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus

dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).

Sidang Tuntutan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang tuntutan terhadap Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe pada Rabu (13/9).

"Untuk selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

"Baik, majelis hakim sudah memberi kesempatan

kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan satu minggu, tanggal 13 September 2023," ujarnya.

Hakim Rianto memberi waktu sekitar sepekan kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan surat tuntutan Lukas Enembe. Di sisi lain, hakim juga meminta kepada tim penasihat hukum Lukas Enembe untuk menyiapkan nota pembelaan atau pleidoi.

Dalam perkara ini, Lukas didakwa telah menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar. Dengan rincian, ia menerima suap sebesar Rp45.843.485.350 (Rp45,8 miliar) dan gratifikasi sebesar Rp1 miliar. Suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Papua. ● han

MAKI Sebut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Kekanak-kanakan

JAKARTA (IM) - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, memenuhi panggilan Dewas KPK terkait laporannya soal dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Boyamin menuding Alexander kekanak-kanakan.

Boyamin awalnya menjelaskan permasalahan yang dilaporkannya. Dia menyebut ada tiga dugaan pelanggaran etik yang diadukannya ke Dewas KPK.

"Yang saya laporkan kan ada dua sebenarnya awalnya, tapi kemudian jadi tiga," kata Boyamin di Gedung ACLC

KPK, Jakarta Selatan, Rabu (6/9).

Boyamin mengatakan aduan pertama terkait pengumuman penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Basarnas Henri Alfandi. Menurut Boyamin, yang berwenang menetapkan status tersangka kepada Henri ialah POM TNI karena Henri merupakan militer.

"Pertama adalah pengumuman dan penetapan tersangka terhadap pihak TNI. Yang diumumkan itu nomor satu, dua, tiga, empat, lima, yang nomor lima itu kan TNI di kompers kan diumumkan dan ditetapkan sebagai tersangka, saya tidak berwenang itu yang pertama karena itu kewenangan koneksitas atau tim gabungan atau oleh POM TNI sendiri terpisah," ujarnya.

Boyamin mengatakan aduan kedua terkait tidak adanya surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap Henri. Dia mengatakan hal itu menyebabkan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP) juga tidak ada.

"Kedua, pengumuman tersangka tapi tidak ada sprindik, otomatis tidak ada SPDP. Karena tidak ada surat perintah penyidikan yang karena otomatis tidak ada surat pemberitahuan penyidikan yang disampaikan pada penuntut umum, pelapor, terlapor atau tersangka. Jadi dua hal itu," tuturnya.

Aduan ketiga, katanya, terkait sikap Alexander. Dia menganggap Alexander kekanak-kanakan karena menyebut aduan Boyamin ke Dewas KPK tak bermutu.

"Yang ketiga kemudian yang saya laporkan ya sikap kekanak-kanakan Pak Alex Marwata dalam menanggapi aduan saya ke Dewan Pengawas. Beliau mengatakan laporan Boyamin tidak bermutu, maka saya jadikan laporan ketiga itu, tambahan," ucapnya.

"Bahwa itu bukan sikap pimpinan KPK yang berkodetik, bersikap baik, mem-berikan teladan dan tidak melakukan perbuatan tercela bahasanya dewasa lah. Wong jubir KPK Pak Ali Fikri aja mengatakan itu adalah tindakan yang melalui jalurnya, tindakan terhormat beradab dan sebagainya. Kalau tidak bermutu, berarti nanti Dewan Pengawasnya tidak bermutu dong," lanjutnya.

Boyamin mengatakan dirinya diperiksa oleh lima Anggota Dewas KPK. Boyamin mengatakan Pimpinan KPK harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas-tugasnya. "Tadi diklarifikasi lengkap, saya juga kaget surprise lima orang datang semua. Bu Albertina Ho, Pak Tumpak Panggabean, Pak Syamsuddin Haris, Pak Haryono dan Prof Seno Adji. Semua tanya saya mendalam nggak bisa saya

buka lah. Intinya berkaitan dengan itu. Ini saya permasalahan bukan hanya soal keleso lidah, tapi hati-hati, keleso sikap hati-hati kan Pimpinan KPK harus hati-hati berdasarkan ketentuan yang ada. Ini tidak hati-hati dan tidak sesuai ketentuan," ujarnya.

Sebelumnya, Alexander Marwata merespons laporan MAKI terhadap dirinya ke Dewas KPK. Alexander mengaku tidak memikirkan laporan tersebut.

"Bilang ke MAKI, emang gua pikirin," kata Alexander kepada wartawan, Kamis (3/8).

Alexander tak masalah dengan laporan MAKI tersebut. Dia juga tidak peduli.

"Terserah MAKI mau melaporkan apa saja, saya nggak peduli. Ngapain mikirin laporan MAKI yang nggak bermutu," ucapnya. ● han

PENGUMUMAN LIKUIDASI

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan akta No. 7 Tgl. 5 September 2023, dibaris di hadapan Miki Tanuniharja, SH, Notaris di Jakarta, PT AMARTA INDONESIA (Perseroan), berkedudukan di Jakarta Pusat, telah dibubarkan. Sehubungan hal tersebut kami, Likuidator Perseroan, mengundang para Debitor, Kreditur dan pihak pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan tagihan-tagihan, hutang-hutang dan hubungan hukum lainnya serta menyampaikan secara tertulis kepada Likuidator pada alamat dibawah ini paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman ini.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 1 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

LIKUIDATOR
PT AMARTA INDONESIA
(Dalam Likuidasi*)
Jalan Lautze No.22-K, Jakarta Pusat 10710

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 05 September 2023 No. 153, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. Sentral Sukses Mandiri, berkedudukan di Jakarta Barat.

Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi
PT. Sentral Sukses Mandiri

PENGUMUMAN

HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI PT MITRAUTAMA SEJAHTERA LOGISTIK

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para pemegang saham No. 01, Tanggal 01 September 2023 Yang dibuat di hadapan Ny. SRI ARTATI, SH, Notaris Di Kota Tangerang Selatan, para pemegang saham PT MITRAUTAMA SEJAHTERA LOGISTIK (dalam Likuidasi) suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") telah menyetujui dan menerima Sepenuhnya hasil akhir pelaksanaan tugas likuidator sehubungan dengan tindakan penyelesaian proses Likuidasi Perseroan dan memberikan pembatasan tanggung jawab (equity et de charge) kepada Likuidator atas segala tindakan yang diambil selama proses likuidasi. Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 07 September 2023

Likuidator
PT MITRAUTAMA SEJAHTERA LOGISTIK

PENGUMUMAN

Berdasarkan SIKRULER RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM PT INDOCAST MEDIA NUSANTARA berkedudukan di Jakarta Selatan, tanggal 05 September 2023, selanjutnya disebut juga ("Perseroan"). Dengan ini para pemegang saham menyetujui mengumumakan Pembubaran PT INDOCAST MEDIA NUSANTARA terhitung sejak ditandatangani Sirkuler Rapat Para Pemegang Saham.

Pihak-pihak yang berkepentingan/keberatan atas Pembubaran tersebut dapat menyampaikan secara tertulis kepada:

"PT INDOCAST MEDIA NUSANTARA"
Club House Sovereign 78, Lt. 1,
Jl. Kemang Raya No.78, RT.013, RW.002,
Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12730.

Demikian agar masyarakat mengetahui.
Jakarta, 7 September 2023
PT. INDOCAST MEDIA NUSANTARA
Ttd
Direksi

PENGUMUMAN

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BARAKONSTRUKSI SUKSES MANDIRI, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") tanggal 07 September 2023, dengan ini mengumumakan rencana pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut. Bagi pihak – pihak yang memiliki kepentingan, termasuk kreditur perihal pengajuan penagihan atau keberatan secara tertulis, dapat menyampaikan pengajuannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini, kepada: Maria A. Murtiati selaku Likuidator dari Perseroan, dengan alamat:

PT BARAKONSTRUKSI SUKSES MANDIRI
Grha Baramulti
Komplek Harmoni Plaza, Blok A-8
Jl. Suryopranoto No. 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat – 10130.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a. – Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Hormat Kami,
Likuidator

PENGUMUMAN

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT DINAMIKA SARANA GRUP, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") tanggal 07 September 2023, dengan ini mengumumakan rencana pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut. Bagi pihak – pihak yang memiliki kepentingan, termasuk kreditur perihal pengajuan penagihan atau keberatan secara tertulis, dapat menyampaikan pengajuannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini, kepada: Vinna Widjaja selaku Likuidator dari Perseroan, dengan alamat:

PT DINAMIKA SARANA GRUP
Grha Baramulti
Komplek Harmoni Plaza, Blok A-8
Jl. Suryopranoto No. 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat – 10130.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a. – Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Hormat Kami,
Likuidator

FOTO: ANTARA



RAPAT KERJA KOMISI I DPR DENGAN KEMENHAN DAN TNI

Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (purn) Muhamad Herindra (kanan) berbincang bersama KASAL Muhammad Ali sebelum mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2024.